



Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Embriati¹, Bakkareng², Andre Bustari³

¹ Fakultas Ekonomi, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: embriati@gmail.com

² Fakultas Ekonomi, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

³ Fakultas Ekonomi, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Corresponding Author: Embriati

Abstract: *This research discusses the influence of tax knowledge and modern tax administration systems on taxpayer compliance at the Mentawai Islands Regency Regional Financial Agency Office. Data processing in this research uses a multiple regression model. The data source in this research is primary data obtained directly from research respondents through questionnaires distributed. The samples taken in this research used the Incidental Sampling technique and the Slovin Formula. The analysis results from this research show that the tax knowledge variable has a positive effect on taxpayer compliance with a significant value of α ($0.000 < 0.05$). The modern tax administration system variable has a positive effect on taxpayer compliance α ($0.000 < 0.05$). The variable Tax Knowledge and the modern tax administration system simultaneously influence taxpayer compliance with a significance value of α ($0.000 > 0.05$). Based on the results of this research, it is hoped that further research can expand the research population, namely by increasing the number of respondents who work at the Mentawai Islands Regional Financial Agency. The importance of increasing tax knowledge among the public is to create a positive perception. Tax-collecting agencies would be better if they helped taxpayers understand taxation. Tax officers are expected to be more intense in conducting outreach to taxpayers, either directly, namely gathering taxpayers in one place and then carrying out outreach, or indirectly, namely through mass media or social media.*

Keywords: *Tax Knowledge, Modern Tax Administration System, Taxpayer Compliance, Regional Financial Agency.*

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang pengaruh pengetahuan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan model regresi berganda. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden penelitian melalui kuesioner yang disebar. Sampel yang diambil dalam penelitian ini menggunakan teknik Incidental Sampling dan

Rumus Slovin. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan α ($0,000 < 0,05$). Variabel sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak α ($0,000 < 0,05$). Variabel Pengetahuan Perpajakan dan sistem administrasi perpajakan modern secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi α ($0,000 > 0,05$). Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas populasi penelitian yaitu dengan memperbanyak jumlah responden yang bekerja pada Badan Keuangan Daerah Kepulauan Mentawai. Pentingnya peningkatan pengetahuan perpajakan di kalangan masyarakat adalah untuk menciptakan persepsi positif. Lembaga pemungut pajak akan lebih baik jika membantu wajib pajak memahami perpajakan. Petugas pajak diharapkan lebih intens dalam melakukan sosialisasi kepada wajib pajak, baik secara langsung yaitu mengumpulkan wajib pajak pada suatu tempat kemudian melakukan sosialisasi, maupun secara tidak langsung yaitu melalui media massa atau media sosial.

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kepatuhan Wajib Pajak, Badan Keuangan Daerah.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia, khususnya di bidang ekonomi terus diupayakan dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup masyarakat. Pencapaian sasaran dan target pembangunan ekonomi membutuhkan sumber pembiayaan yang cukup. Agar dapat meraih tujuan tersebut, pajak dianggap sebagai alat fiskal yang sangat kuat untuk mencapai tujuan tersebut, pajak dianggap sebagai alat fiskal yang sangat kuat untuk mencapai tujuan target ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, stabilisasi, serta distribusi pendapatan dan kekayaan yang lebih adil (Astriningtyas, 2017:1)

Penerimaan pajak sangatlah penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan kegiatan pembangunan karena pemasukan yang berasal dari pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang sangat besar jumlahnya untuk digunakan sebagai alat utama membiayai pengeluaran pemerintah. Pajak juga menjadi bagian utama dari kebijakan fiskal yang dijadikan Pemerintah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan sehingga dapat mencapai tujuan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, pemerintah juga sangat membutuhkan pajak untuk menekan pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Dalam jangka panjang peranan perpajakan sebagai sumber biaya pembangunan akan semakin besar (Astriningtyas, 2017:2)

Penerimaan pajak harus sejalan dengan kepatuhan wajib pajak pada masyarakat. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak Negara akan berkurang (Rahayu & Suhayati, 2015: 56).

Terbukti menurut Agus Martowardojo menyatakan tingkat kepatuhan seluruh unsur di Indonesia terhadap pajak masih rendah. Seperti wajib pajak perorangan masih sebanyak 8,5 juta dari 110 juta yang aktif bekerja dengan rasio SPT hanya 7,7 persen. Dibandingkan dengan Negara lain seperti Jepang mencapai 50%. Sementara itu, badan usaha yang

berdomisili dengan tempat usaha tetap dan aktif sebanyak 12 juta maka hanya 3,6% kepatuhan (Sara & Rahmat, 2018: 75)

Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan sebagian besar wajib pajak tentang pajak, serta persepsi wajib pajak tentang pajak dan petugas pajak masih rendah. Sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu juga ada yang diperoleh dari radio, televisi, majalah pajak, surat kabar, internet, buku perpajakan, konsultan pajak, seminar pajak dan adapula yang diperoleh dari pelatihan pajak. Lebih lanjut (Alpen et al., 2015: 46) mengatakan bahwa frekuensi pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sering dilakukan. Bahkan, pengetahuan tentang pajak belum secara komprehensif menyentuh dunia pendidikan. Oleh karena itu, pada tataran pendidikan mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi masih belum tersosialisasi pajak secara menyeluruh, kecuali mereka yang menempuh jurusan perpajakan (Alpen et al., 2015: 46). Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, karena bagaimana mungkin wajib pajak disuruh patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, artinya bagaimana wajib pajak disuruh untuk menyerahkan SPT tepat waktu jika mereka tidak tahu kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Kelemahan administrasi perpajakan modern disebabkan oleh belum optimalnya upaya reformasi administrasi yang dilakukan khususnya yang berkaitan dengan reformasi struktur, prosedur, strategi, dan budaya sehingga reformasi administrasi yang dilakukan selama ini masih terfokus pada reformasi administrasi dari aspek reorganisasi dengan memperbesar struktur organisasi, memperbanyak jumlah pegawai dan memperbanyak jalur prosedur (Hendroharto, 2016).

Aspek kepatuhan pajak sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Hal ini dikarenakan, kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah kunci dari keseluruhan sistem perpajakan sehingga dengan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi niscaya akan mendongkrak tingkat penerimaan pajak yang tinggi pula. Tahun 2001 dilakukannya reformasi administrasi perpajakan. Program reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan system administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi yang di rancang berdasarkan fungsi, tidak lagi menurut seksi-seksi berdasarkan jenis pajak, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *account representative* dan *complaint center* untuk menampung keberatan wajib pajak. Selain itu system administrasi perpajakan modern juga merangkul kemajuan teknologi terbaru diantaranya pengembangan System Informasi Perpajakan (SIP) dengan pendekatan fungsi menjadi System Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang di kendalikan oleh *case management system* dan *work flow system* dengan berbagai pelayanan yang berbasis e-system, seperti e-SPT, e-filling, e-billing, e-payment, dan e-regISTRATION yang diharapkan meningkatkan mekanisme control yang lebih efektif di tunjang dengan penerapan kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas dan pelaksanaan *good governance*. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern tersebut diharapkan dapat berfungsi efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan *self assessment system* (Rahayu & Suhayati, 2015: 56).

Sumatera Barat sendiri khususnya di Kabupaten Mentawai dalam hal ini pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan dan mengembangkan daerahnya dengan mengoptimalkan penerimaan daerah melalui pajak yang dibayarkan tiap tahunnya. Upaya lain yang dilakukan pemerintah daerah Mentawai dengan pengadaan penyuluhan mengenai pajak, pengetahuan pajak serta pemungutan yang dilakukan secara adil, ketat dan lebih teliti. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mentawai No 5 tahun 2012 tentang Pajak Pedesaan dan Perkotaan.

Berikut gambaran target dan realisasi penerimaan PBB di Kabupaten Mentawai:

Tabel 1. Perkembangan Tingkat Jumlah Wajib Pajak Badan dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Kepulauan Mentawai

| Tahun | WP Badan Terdaftar | WP Badan yang Menyampaikan SPT | Tingkat Kepatuhan |
|-----------|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| 2014 | 5.738 | 2.248 | 39,17% |
| 2015 | 6.598 | 2.392 | 36,72% |
| 2016 | 7.090 | 2.320 | 32,72% |
| 2017 | 7.487 | 2.445 | 32,65% |
| 2018 | 7.954 | 2.923 | 36,74% |
| Rata-Rata | | | 35,5% |

Sumber: DPKAD Tua Pejat Mentawai

Berdasarkan tabel 1. diatas dapat dilihat perkembangan tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) Kabupaten Mentawai rata-rata tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) Badan dalam 5 tahun terakhir yaitu sebesar 35,5%. Hasil tersebut masih terbilang sangat kurang untuk tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) Badan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional dengan baik.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Kementrian Keuangan terus melakukan upaya-upaya agar pengelolaan penerimaan pajak semakin baik. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan kebijakan perpajakan maupun administrasi perpajakan. Melalui kebijakan perpajakan Direktorat Jenderal Pajak berupaya memperbaharui kebijakan-kebijakan perpajakan yang tertuang dalam undang-undang perpajakan, sedangkan melalui administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak berupaya memperbaharui sistem internal Direktorat Jenderal Pajak agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi wajib pajak (Sari & Jati, 2019: 87)

Demi terwujudnya realisasi penerimaan pajak yang maksimal, selain didukung dengan pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kepatuhan masyarakat dibidang perpajakan juga harus ditunjang dengan kualitas pelayanan fiskus yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak.(Jati, 2019: 79).

Namun kenyataannya, masih ada wajib pajak yang menemukan hambatan dalam proses pelayanan yang diberikan oleh aparat perpajakan, seperti petugas yang lambat, tidak ramah, berbelit-belit, serta keadaan kantor dan layanan yang kurang nyaman, sehingga menimbulkan berbagai keluhan, dan pada akhirnya berakibat pada tumbuhnya sikap tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sara Lusiana yang berjudul pengaruh pengetahuan pajak dan system administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak tahun (2016) didapatkan hasil bahwa Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Masalah yang terjadi pada kepatuhan wajib pajak seperti wajib pajak tidak tepat waktu dalam menyetor dan melaporkan SPT terjadi karena masih banyak wajib pajak masih belum mengetahui bagaimana peraturan perpajakan. Sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Masalah yang terjadi pada kepatuhan wajib pajak terjadi karena masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui dan memahami benar e-system dan cara penggunaannya serta sering terjadi kendala dari segi teknis dalam sistem online sehingga bertumpuknya data yang akhirnya sistem online menjadi terhambat.

Penelitian yang dilakukan Masyhur (2017) yang berjudul pengaruh system administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak didapatkan hasil bahwa Besarnya pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak, dapat diartikan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, mengindikasikan perlunya dilakukan perbaikan-perbaikan dalam administrasi perpajakan seperti melalui berbagai program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak yang terwujud dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Moderen Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi kasus pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mentawai)”.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan pada suatu lembaga Badan Keuangan Daerah berlokasi di Jl. Raya Tuapejat KM 4 Sipora Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat.

Metode Penelitian yang menggambarkan suatu fenomena sosial atau pemahaman dari suatu realita dan merincikan menjadi variabel yang saling berkaitan dengan tujuan memperoleh pemahaman dan makna dari masalah yang akan diteliti. Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya persentase jawaban responden terhadap kedua variabel yang dianalisa.

Menurut Sugiyono (2015:93) bahwa untuk mengukur pendapat atau persepsi seseorang atau kelompok sosial dalam suatu penelitian menggunakan skala pengukuran Liker. Skala Liker akan merubah variabel-variabel menjadi indikator variabel yang pada akhirnya dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrumen berupa pernyataan atau pertanyaan. Instrumen penelitian ini dibuat dalam bentuk ceklis dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila jawaban responden Sangat Setuju (SS) diberi nilai = 5
2. Apabila jawaban responden Setuju (S) diberi nilai = 4
3. Apabila jawaban responden Kurang Setuju (KS) diberi nilai = 3
4. Apabila jawaban responden Tidak Setuju (TS) diberi nilai = 2
5. Apabila jawaban responden Sangat Tidak Setuju (STS) diberi nilai = 1

Menurut Arikunto (2016:65) Analisis ini bermaksud untuk menggambarkan karakteristik masing-masing variabel penelitian. Dengan cara menyajikan data ke dalam tabel

distribusi frekuensi, menghitung nilai rata-rata, skor total, dan tingkat pencapaian responden (TCR) serta menginterpretasikannya. Analisis ini tidak menghubungkan-hubungkan satu variabel dengan variabel lainnya dan tidak membandingkan satu variabel dengan variabel lainnya. Untuk mencari tingkat pencapaian jawaban responden digunakan rumus berikut:

$$TCR = \frac{\text{rata-rata skor}}{5} \times 100$$

Dimana: TCR = tingkat pcpaian jawaban responden menyatakan bahwa kriteria nilai tingkat capaian responden (TCR) dapat diklasifikasikan sebagai berikut

Tabel 2. Tingkat Capaian Responden

| No | Tingkat Capaian Responden (TCR) | Kriteria |
|----|---------------------------------|-------------|
| 1 | 90 % - < 100 % | Sangat Baik |
| 2 | 80 % - < 90 % | Baik |
| 3 | 65 % - < 80 % | Cukup Baik |
| 4 | 55% - < 65 % | Kurang Baik |
| 5 | 0% - < 55 % | Tidak Baik |

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013: 160). Seperti diketahui bahwa Uji T dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik atau uji statistik (Ghozali, 2013: 160).

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal.

Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Jika data (titik) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka menunjukkan pola distribusi normal yang mengindikasikan bahwa regresi memenuhi asumsi normal. Uji Statistik yang digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji *statistic non-parametrik Kolmogrov-Smirnov (K-S)* Artinya jika nilai *Kolmogrov-Smirnov* > 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal.

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2013: 105). Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas didalam model regresi adalah sebagai berikut:

1. Nilai R square (R²) yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris yang sangat tinggi, tetapi secara individual tidak terikat
2. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen terdapat korelasi yang cukup tinggi (lebih dari 0,09), maka merupakan indikasi adanya multikolonieritas

3. Melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF), suatu model regresi yang bebas dari masalah multikolonieritas apabila mempunyai nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10.

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2013:44). Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Kebanyakan data *crosssection* mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar).

Analisis regresi linier berganda adalah regresi linier untuk menganalisis besarnya hubungan dan pengaruh variabel independen yang jumlahnya lebih dari dua (Sugiono, 2014: 210). Adapun persamaan model regresi berganda tersebut adalah (Sugiono, 2014: 210):

$$Y = \lambda + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

- Y : kepatuhan wajib pajak
- λ : bilangan konstan
- b_1, b_2, \dots, b_k : koefisien variabel bebas
- x_1, x_2 : variabel independen
- x_1 : pengetahuan perpajakan
- x_2 : sistem administrasi perpajakan modern

Koefisien determinasi (R^2) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Dan sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen (Ghozali, 2016:58).

Uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial (Ghozali, 2016).

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat (Ghozali, 2016).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Validitas

1. Variabel Pengetahuan Pajak (X1)

Tabel 3. Pengetahuan Pajak (X1)

| No Item | Batas Valid | Koefisiensi Korelasi | Keterangan |
|---------|-------------|----------------------|------------|
| 1 | 0,202 | 0.691 | Valid |
| 2 | 0,202 | 0.548 | Valid |
| 3 | 0,202 | 0.480 | Valid |
| 4 | 0,202 | 0.761 | Valid |
| 5 | 0,202 | 0.824 | Valid |

| No Item | Batas Valid | Koefisiensi Korelasi | Keterangan |
|---------|-------------|----------------------|------------|
| 6 | 0,202 | 0.771 | Valid |
| 7 | 0,202 | 0.729 | Valid |
| 8 | 0,202 | 0.764 | Valid |
| 9 | 0,202 | 0.594 | Valid |
| 10 | 0,202 | 0.617 | Valid |

Sumber : Hasil pengolahan data, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan semua item pengetahuan pajak 1 sampai item pengetahuan pajak 10 adalah valid dimana nilai *correlated item total correlation* > 0,202.

2. Pengujian Validitas Variabel Administrasi Perpajakan Modern (X2)

Tabel 4. Perpajakan Modern (X2)

| No Item | Batas Valid | Koefisiensi Korelasi | Keterangan |
|---------|-------------|----------------------|------------|
| 1 | 0,202 | 0.531 | Valid |
| 2 | 0,202 | 0.696 | Valid |
| 3 | 0,202 | 0.860 | Valid |
| 4 | 0,202 | 0.747 | Valid |
| 5 | 0,202 | 0.523 | Valid |
| 6 | 0,202 | 0.858 | Valid |
| 7 | 0,202 | 0.749 | Valid |
| 8 | 0,202 | 0.805 | Valid |

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan semua item 1 sampai item administrasi perpajakan modern 8 adalah valid dimana nilai *correlated item total correlation* > 0,202.

3. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 5. Wajib Pajak (Y)

| No Item | Batas Valid | Koefisiensi Korelasi | Keterangan |
|---------|-------------|----------------------|------------|
| 1 | 0,202 | 0.584 | Valid |
| 2 | 0,202 | 0.851 | Valid |
| 3 | 0,202 | 0.823 | Valid |
| 4 | 0,202 | 0.503 | Valid |
| 5 | 0,202 | 0.852 | Valid |
| 6 | 0,202 | 0.823 | Valid |
| 7 | 0,202 | 0.617 | Valid |
| 8 | 0,202 | 0.834 | Valid |

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan semua item kepatuhan wajib pajak 1 sampai item 8 adalah valid dimana nilai *correlated item total correlation* > 0,202.

Reabilitas

Tabel 6. Hasil Uji Reabilitas

| No | Variabel | Cronbachs Apha | Keterangan |
|----|--------------------------------|----------------|--------------|
| 1 | Pengetahuan Pajak | 0,972 | Reliabilitas |
| 2 | Administrasi Perpajakan Modern | 0,949 | Reliabilitas |
| 3 | Kepatuhan Wajib Pajak | 0,965 | Reliabilitas |

Berdasarkan tabel 6 dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan realibel. Semua variabel realibel disebabkan karena hasil *correlated total item correlation* besar dari 0,202 (untuk $n=97$ r table = 0,202).

Uji Normalitas

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas

| | | Unstandardized Residual |
|--------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 97 |
| Normal Parameters,a,b | Mean | 0,0000000 |
| | Std. Deviation | 3.98291009 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .099 |
| | Positive | .099 |
| | Negative | -.070 |
| Test Statistic | | .099 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .200c,d |

Dari Tabel 7 diketahui bahwa nilai Asym.Sig (2-tailed) untuk unstandardized residual sebesar 0,200, dapat disimpulkan bahwa nilai Asym.Sig (2-tailed) dalam penelitian ini nilainya lebih besar dari tingkat signifikan yang digunakan pada penelitian yaitu ($\alpha = 0,05$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel penelitian berdistribusi normal, dengan demikian analisis regresi linear berganda dapat dilaksanakan karena data telah berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinieritas

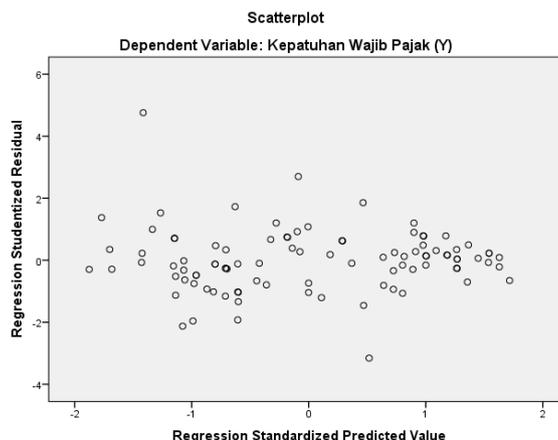
| No | Variabel | Cronbachs Apha | | Keterangan |
|----|---------------------------------------|----------------|-------|-------------------------|
| | | Toleranc e | VIF | |
| 1 | Pengetahuan Pajak | 0.558 | 1,792 | Tidak Multikolinieritas |
| 2 | Sistem Administrasi Perpajakan Modern | 0.558 | 1,792 | Tidak Multikolinieritas |

Berdasarkan hasil olahan data untuk uji multikolinieritas sebagaimana terlihat pada tabel 8 di atas diketahui bahwa nilai *tolerance* dari *Collinearity Statistics* mendekati 1 (satu) dan nilai *VIF* (*Variance Inflation Factor*) untuk semua variabel bebas di bawah 10 (sepuluh). Dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* pada variabel pengetahuan pajak dan sistem administrasi perpajakan modern adalah $0,558 > 0,1$ dan nilai *VIF* $1,792 < 10$. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang berarti antara sesama variabel bebas. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data hasil penelitian ini tidak mengalami kasus multikolinieritas sehingga pengolahan data dengan regresi linear berganda dapat dilanjutkan, karena tidak terdapat kasus multikolinieritas antara sesama variabel bebas..

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 1 ditemukan penyebaran data tidak teratur, hal tersebut terlihat pada plot yang menyebar atau terpecah dan tidak membentuk pola tertentu, hal ini dapat

disimpulkan tidak ada terjadi kasus heterokedastisitas, maka dapat disimpulkan tidak ada terjadi heterokedastisitas maka penelitian dapat dilanjutkan.



Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas

Regresi Linear Berganda dan Uji T

Tabel 9. Hasil Uji T

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig |
|--|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| (Constant) | .744 | 2.261 | | .329 | .743 |
| Pengetahuan Perpajakan (X1) | .444 | .064 | .526 | 6.941 | .000 |
| Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X2) | .467 | .091 | .387 | 5.108 | .000 |

1. Nilai konstanta sebesar 0,744 yang berarti bahwa jika tidak ada variabel bebas yang terdiri Pengetahuan Pajak Sistem Administrasi dan Perpajakan Modern, yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, maka besarnya Kepatuhan Wajib Pajak adalah 0,744.
2. Variabel Pengetahuan Pajak (X1) mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan koefisien regresi Pengetahuan Pajak dari perhitungan linier berganda. Pengetahuan Pajak (X1) akan menyebabkan meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,444, asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan.
3. Variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X2) mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, yang artinya apabila Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X2) meningkat sebesar 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,467 dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan.

Uji Koefisiensi Determinasi

Tabel 10. Hasil Uji Koefisiensi Determinasi

| Model Summary | | | | |
|---------------|-------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .836a | .698 | .692 | 3.361 |

Menurut (Ghozali, 2013), Nilai R^2 memiliki nilai interval antar 0 sampai 1 semakin besar R^2 (mendekati 1), maka semakin baik pula hasil untuk model tersebut dan semakin mendekati 0, maka independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen ($0 \leq R^2 \leq 1$). Besar nya nilai adjusted R^2 sebesar 0,692 yang berarti variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 69,2% sedangkan sisanya 30,8 % dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam variable penelitian ini

Uji t

Hasil perhitungan yang didapat pada tabel 4.7 variabel Pengetahuan Pajak secara statistik menunjukkan hasil yang signifikan pada nilai lebih kecil dari α ($0,000 < 0,05$). Sedangkan nilai t hitung $X_1 = 6,941$ dan t tabel sebesar 1.985 sehingga t hitung $>$ t tabel ($6,941 > 1.985$). Maka H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variable Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di kantor Badan Keuangan Daerah Kepulauan Mentawai.

Hasil perhitungan yang didapat pada tabel 4.7 variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern statistik menunjukkan hasil yang signifikan pada nilai lebih kecil dari α ($0,000 < 0,05$). Sedangkan nilai t hitung $X_2 = 5.108$ dan t tabel sebesar 1.985 sehingga t hitung $>$ t tabel ($5.108 > 1.985$). Maka H_2 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variable Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada masyarakat yang membayar pajak di kantor Badan Keuangan Daerah Kepulauan Mentawai.

Uji F

Tabel 11. Hasil Uji F

| Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|------------|----------------|----|-------------|---------|-------|
| Regression | 2458.148 | 2 | 1229.074 | 108.791 | 0,000 |
| Residual | 1061.976 | 94 | 11.298 | | |
| Total | 3520.124 | 96 | | | |

Berdasarkan tabel 11 di atas nilai F hitung diperoleh 108,791 dengan tingkat signifikansi 0,000, karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H_3 diterima dan nilai F hitung $>$ F tabel ($108,791 > 3,09$) dengan nilai F tabel df: F (k ; n-k) atau F (2; 97-2) = 3,09. Dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak..

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan persamaan regresi di atas, Pengetahuan Pajak (X_1) koefisien regresi sebesar 0,444 maksudnya adalah jika setiap kenaikan 1 satuan Pengetahuan Pajak akan menyebabkan meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,444 dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan. Berdasarkan pada tabel 4.15 di atas variabel Pengetahuan Pajak mempunyai nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05. Sedangkan nilai t hitung $X_1 = 6,941$ dan t tabel sebesar 1.985 sehingga t hitung $>$ t tabel ($6,941 > 1.985$). Maka H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Pajak berpengaruh

positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada masyarakat yang membayar pajak di kantor Badan Keuangan Daerah Kepulauan Mentawai.

Berdasarkan uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga semakin tinggi Pengetahuan Perpajakan akan semakin patuh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Pengetahuan itu sendiri antara lain Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, dan Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Pengetahuan Perpajakan merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor yang sangat penting, karena Pengetahuan Perpajakan tersebut dapat memotivasi seseorang untuk melakukan suatu tindakan dalam hal ini yaitu membayar kewajiban pajaknya. Dampak dari kurangnya pengetahuan perpajakan dari wajib pajak yaitu banyak wajib pajak yang melakukan keterlambatan baik dalam pembayaran maupun pelaporan karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Ria (2016) mengatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan, memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan tinggi terhadap ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan akan mempermudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan akan mengurangi kesalahan Wajib Pajak dalam mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), menghitung jumlah pajak terutang serta menyetorkan pajak

Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan persamaan regresi di atas, Sistem Administrasi Perpajakan Modern dengan koefisien regresi sebesar 0,467 maksudnya adalah jika setiap kenaikan 1 satuan Sistem Administrasi Perpajakan Modern akan menyebabkan peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,467 dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan. Berdasarkan pada tabel 4.15 di atas nilai t hitung sebesar 5,108 dan sig t sebesar 0,000. Dengan demikian sig t pada nilai lebih kecil dari α ($0,000 < 0,05$). Sedangkan nilai t hitung X^2 5,108 dan t tabel sebesar 1.985 sehingga t hitung $>$ t table ($5,108 > 1.985$). Maka H₂ diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada masyarakat yang membayar pajak di kantor Badan Keuangan Daerah Kepulauan Mentawai.

Pada hakekatnya kondisi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak termasuk Wajib Pajak Badan, langkah-langkah perbaikan administrasi diharapkan dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak, karena kepatuhan wajib pajak dimungkinkan menjadi satu variable yang berperan besar dalam menentukan penerimaan pajak.

Besarnya pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada masyarakat yang membayar pajak di kantor Badan Keuangan Daerah Kepulauan Mentawai, dapat diartikan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, mengindikasikan perlunya dilakukan perbaikan-perbaikan dalam administrasi

perpajakan seperti melalui berbagai program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2016 yang terwujud dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern.

Silvani (2017:07), dalam jurnal penelitiannya yang berjudul : “*Tax Administration Reform and Fiscal Adjustment: The Case of Indonesia*” , menyimpulkan bahwa untuk kasus Indonesia, pengaruh reformasi ini terlihat sangat jelas dari peningkatan pajak negara yang signifikan sejak dilakukannya reformasi. Hal ini mencerminkan bahwa reformasi perpajakan berpengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lusiana Jayanti Sara (2017) didapatkan hasil bahwa Sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Masyhur (2016) juga membuktikan bahwa Sistem administrasi perpajakan modern meliputi: (1) modernisasi struktur organisasi, (2) modernisasi prosedur organisasi,(3) modernisasi strategi organisasi, dan (4) modernisasi budaya organisasi berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak.

Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil statistik secara simultan didapat hasil bahwa pengetahuan pajak dan sistem administrasi perpajakan modern secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini dapat dilihat pada tabel 4.16 bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti $0,000 < 0,05$. Sedangkan nilai f hitung lebih besar dari f tabel ($108.791 > 3,09$). Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak dan sistem administrasi perpajakan modern secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Lusiana Jayanti Sara (2017) terdapat pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Pratama Bandung. Selain itu penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Ni Kadek dan Ketut Alit (2017) bahwa terdapat pengaruh pada kepatuhan wajib pajak yaitu: kesadaran WP, pengetahuan perpajakan, persepsi tentang pelayanan fiskus dan persepsi wajib pajak tentang sanksi administrasi berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Badung dengan demikian H3 diterima.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa data, interpretasi hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial menunjukkan hasil 0,000 kurang dari 0,05. Sedangkan nilai t hitung $X_1 = 6,941$ dan t tabel sebesar 1.985 sehingga t hitung $> t$ tabel ($6,941 > 1.985$). Maka H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada masyarakat yang membayar pajak di kantor Badan Keuangan Daerah Kepulauan Mentawai.
2. Variabel sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial menunjukkan hasil yang signifikan pada nilai lebih kecil dari α ($0,000 < 0,05$), sedangkan nilai t hitung X_2 5,108 dan t tabel sebesar 1.985 sehingga t

hitung > t table (5,108 > 1.985). Maka H2 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor Badan Keuangan Daerah Kepulauan Mentawai.

3. Pengetahuan Pajak dan sistem administrasi perpajakan modern secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan statistik menunjukkan hasil yang signifikan pada uji f yaitu α ($0,000 < 0,05$), sedangkan nilai f hitung lebih besar dari f tabel ($108.791 > 3,09$). Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak dan sistem administrasi perpajakan modern secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor Badan Keuangan Daerah Kepulauan Mentawai.

REFERENSI

- Angkoso, Berly. 2010. *Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Dasar Wajib Pajak Tentang Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Efendy, Moh. Ardianto Refly. 2015. *Pengaruh Biaya Kepatuhan, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Administrasi Bisnis Perpajakan (JAB) Vol. 5 No. 2 2015.
- Fitri, Kurniawaty. 2014. *Dampak Pengalihan Pengelolaan Pbb-P2 Terhadap Penerimaan PBB Di Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru*. Jurnal Ekonomi Volume 22, Nomor 1 Maret 2014.
- Franklin, Bernama. 2014. *Pengaruh Tingkat pemahaman, pengalaman, penghasilan, administrasi perpajakan, kompensasi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Padang Barat*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Padang.
- Handayani, Kadek Putri, dkk. 2012. *Pengaruh Efektifitas e-SPT Masa PPN pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Denpasar Barat*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.1 (2013): 19-38
- Hardiningsih, Pancawati, dkk. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Nopember 2011, Hal: 126 -142 Vol. 3, No. 1
- Laily, Jannatul Poetry. 2013. *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Yayasan Pendidikan Swasta dalam Membayar Pajak Penghasilan*. Skripsi. Universitas Jember.
- Muliari, N.K, dan Putu Ery Setiawan, 2011. *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis Vol.6, No.1 Januari 2011.1-23.
- Mutia, Sri Putri Tita. 2014. *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Pahala, Indra, dan Nuramalia. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Mengenai Beban Pajak Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4.
- Poetry, Jannatul Laily, dkk. 2014. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Yayasan Pendidikan Swasta Dalam Membayar Pajak Penghasilan*. Artikel Ilmiah. Universitas Jember.
- Prabawa, Made Adi Mertha, dkk. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sikap Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Badung Utara*. Bali:

- Udayana Denpasar.
- Qomaria, Siti. 2018. *Analisis Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Membayar Pajak*. Skripsi strata-1. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah.
- Sairi, Muhammad. 2014. *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah Di Kabupaten Probolinggo*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Sapriadi, Doni. 2013. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB (Pada Kecamatan Selupu Rejang)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Saputra, Robert. 2015. *Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan*. Artikel Ilmiah. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Sari, Titra Ratna. 2015. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Naskah Publikasi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sasana, Hadi. 2015. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan*. (Studi kasus di Kabupaten Banyumas)
- Supadmi, Ni Luh. 2010. *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Supriyanto. 2013. *Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Mutu Pelayanan dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. Jurnal Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Susilawati, dkk. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntansi Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
- Syahril, Farid. 2013. *Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pph Orang Pribadi*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Utami, Thia Dwi, dkk. 2012. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu*. Jurnal Akuntansi. STIE MDP.
- Utomo, Banyu Ageng. 2011. *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Wicaksono, Dimas Bayu. *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Perpajakan Wajib Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan*. Usulan Penelitian.
- Yusnidar, Johan, dkk. 2015. *Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 1 No. 1 Januari 2015.
- Peraturan Daerah Kota Mentawai Nomor 5 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan*. 2012. Bukittinggi. Penerbit Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi.
- Permatasari, Aprilia. 2012. *Pengaruh Kesadaran WP Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WP Dalam Membayar PBB*. Bali: Universitas Udayana